UPAYA PENATAAN PASAR PAJAK LAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017

Oleh :

Ega Van Bastian

Email : egavanbastian95@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 6277

ABSTRACT

The Old Tax Market is a market that still causes a lot of problems, the problem that arises is that there are still many Street Vendors (PKL) who sell on the road due to the inadequate number of kiosks and kiosks with the number of traders so many traders cannot sell materials the merchandise is in kiosks and stalls that make them have to sell on the road and of course cause traffic flow to become jammed even causing fatalities due to traffic accidents in the Old Tax market area. The existing parking conditions are also inadequate which makes many traders park their vehicles for loading and unloading activities and the buyers also park in the streets due to the limited parking provided so that road users cross and make traffic jams, even though the old tax market stands in the causeway which is the gateway to Riau Province from the direction of North Sumatra. Other conditions that exist are the limited facilities and infrastructure such as public toilets, so that if the traders and buyers will go to the toilet they must queue first.

The formulation of the problem in this study is (1) What are the efforts in structuring the old tax market by the Regional Government of Rokan Hilir Regency in 2017 ?, (2) what are the obstacles faced in the effort to restructure the old tax market by the Regional Government of Rokan Hilir Regency in 2017?

In this study researchers tried to explain the efforts in structuring the old tax market by the Regional Government of Rokan Hilir Regency. Data collection techniques in this study were using interview techniques and documentation. Based on interviews with all informants and based on supporting data and information obtained by researchers when conducting research. It can be concluded that efforts to restructure the old tax market by the Regional Government of Rokan Hilir Regency have not been going well. Because of the first several factors: lack of awareness of the old tax market traders in Bagan Sinembah Sub-District, Rokan Hilir District, Second: Lack of facilities and infrastructure such as operational funds and operational cars.

Keywords: Efforts, Arrangement, Old Taxes

PENDAHULUAN

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di jelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/di kelola oleh pedagang kecil menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 2 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa :

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi,

yang ada di wilayah yang bersangkutan.

- b) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
 - c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Pasar merupakan salah satu tempat usaha untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan perekonomian masyarakat bawah akan tetapi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan selama ini kurang dalam upaya untuk perbaikan maupun penataan pasar terbukti dengan masih semberawutnya pasar tradisional selama ini termasuk pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah. Pasar pajak lama ini merupakan pasar yang masih banyak menimbulkan permasalahan, masalah yang timbul yaitu masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dibadan jalan akibat jumlah kios dan los yang ada belum memadai dengan jumlah pedagang yang ada, sehingga banyak pedagang yang tidak

bisa menjual bahan dagangannya di kios dan los sehingga membuat mereka harus berjulan di badan jalan dan tentu saja menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet bahkan sampai menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di sekitaran pasar pajak lama.

Kondisi tempat parkir di pasar pajak lama ini juga belum memadai sehingga masih banyak pedagang yang memarkirkan kendaraannya untuk aktivitas bongkar muat dan para pembeli pun juga parkir dibadan jalan akibat terbatasnya tempat parkir yang disediakan sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintasi dan membuat kemacetan, padahal pasar pajak lama berdiri di jalan lintas yang merupakan pintu gerbang masuk ke Provinsi Riau dari arah Sumatera Utara. Kondisi lainnya yang ada adalah terbatasnya sarana dan prasarana seperti toilet umum, sehingga apabila pedagang dan pembeli akan ke toilet harus antri terlebih dahulu. Tidak hanya itu, tumpukan sampah para pedagang sayur dan pedagang ikan di sekitaran pasar pajak lama juga banyak akibat tidak adanya fasilitas tempat sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan sampah tersebut menyumbat drainase sehingga limbah meluap kepermukaan, ketika terjadi hujan menyebabkan air tergenang karna saluran air kurang bagus.

Tabel 1.2. Lahan Bangunan dan Pengelolaan Pasar tahun 2015 – 2017

No	Lahan Bangunan dan Pengelolaan Pasar	Keterangan
1	Luas lahan pasar	10.000 M ²
2	Status kepemilikan lahan	Swasta
3	Dokumen Kepemilikan Lahan	-
4	Peruntukan Lahan	Sesuai
5	Luas Bangunan Pasar	6.000 M ²
6	Tahun Pembanguna n Pasar	1980
7	Tahun Perbaikan	-
8	Kondisi Bangunan Pasar Sekarang	Rusak Berat
9	Jumlah Kios	100
10	Jumlah Los	-
11	Jumlah Seluruh Lapak dalam Los	150
12	Hari Pasar dalam Seminggu	7 Hari
13	Operasional Pasar dalam satu hari	Pagi sampai sore
14	Unit Kerja Pengelola	Swasta
15	Pasar	Aktif

Sumber : Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kondisi bangunan pasar pada tahun 2015-2017 rusak berat dan tidak pernah diadakannya perbaikan di pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah ini.

Pasal 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di jelaskan bahwa Bupati melalui SKPD melakukan.

- a. Memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/ atau relokasi pasar tradisional.
- b. Penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar.
- c. Fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar, dan
- d. Fasilitasi pembentukan wadah / asosiasi pedagang pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui bidang pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan pasar telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dipasar pajak lama ini dengan cara membangun pasar pajak baru dan melengkapi fasilitas yang ada dipasar pajak baru supaya para pedagang yang berjualan di pasar pajak lama bisa memindahkan bahan dagangannya untuk berjualan di pasar pajak baru. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum

yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk berjualan di badan jalan. Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja juga terjun langsung dalam penertiban dan penataan pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah, namun upaya ini tidak berjalan dengan maksimal.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya upaya Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar pajak lama di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ingin mengkaji upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terutama terkait dalam penataan pasar pajak lama di Kecamatan Bagan Sinembah dengan judul “ **Upaya Penataan Pasar Pajak Lama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penataan Pasar Pajak Lama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Upaya Penataan Pasar Pajak Lama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 ?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Diambil dari Skripsi Sat Warsiti dengan judul “Strategi Pemberdayaan dalam Penataan Pasar Legi oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dinas pengelolaan pasar dalam masalah penataan pasar memiliki peran penting sebagai pengatur masalah penataan, pengelolaan dan pengembangan pasar khususnya di Kota Surakarta agar mampu memaksimalkan kinerja yang berkaitan dengan strategi yang berhubungan dengan masalah pasar.

Hasil Penelitian lainnya dalam Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penataan Pedagang kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa, Oleh Hamdan, Muchlas M. Tahir, pada penulisan ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dan factor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karna terelokasi kedalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan.

2. Kerangka Teori

a. Manajemen Pemerintahan

Muhammad Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan diarahkan agar terlebih dahulu mendefinisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang di kerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektivitas, efesiesi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.

Teori Fungsi Manajemen menurut Henry Fayol dalam athoillah diantaranya nya : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (pengarahan), *Coordinating* (pengkoordinasian), *Controlling* (pengawasan).

Beberapa fungsi manajemen terbagi menjadi lima fungsi yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.\

3. Pengarahan

Pengarahan adalah gerak pelaksanaan dari kegiatan perencanaan dan pengoordinasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

4. Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan daya upaya untuk menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak didalam batang tubuh dari keahlian manajemen lainnya akan membuat koordinasi tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, pada organisasi yang dikelola dengan baik sekalipun ada juga bidang yang memerlukan koordinasi.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.

Tujuan koordinasi adalah :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran organisasi.
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang-tindih tugas.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan

penyimpangan tugas dari sasaran.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mendeterminasi segala sesuatu yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, serta mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi pengawasan ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Setelah data pada penelitian ini diperoleh data tersebut di kelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif (data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah adalah pihak yang paling berwenang dalam mengatur dan mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah berhak untuk mengontrol jalannya sebuah

kebijakan disebuah daerah. Salah satu fungsi dari pemerintah daerah adalah pengaturan (regulation). Pelaksanaan fungsi pengaturan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya aktivitas selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Di Kabupaten Rokan Hilir masalah penataan pasar belum ada pengaturan yang jelas, baik dari segi regulasi, letak, dan retribusinya. Hal ini menimbulkan efek negatif seperti mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan kesemrawutan kota. Penataan pasar pajak lama diperlukan guna menciptakan suatu kondisi pasar agar berfungsi dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar khususnya bidang pasar dalam masalah penataan pasar memiliki peranan penting sebagai pengatur masalah penataan, pengelolaan, dan pengembangan pasar agar mampu memaksimalkan kinerja yang berkaitan dengan strategi yang berhubungan dengan penanganan masalah pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar khususnya bidang pasar bukan tidak

pernah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pasar pajak lama ini. Para pedagang pernah dialihkan kelokasi pasar pajak baru agar tidak mengganggu lalu lintas. Akan tetapi, upaya ini tidak membuahkan hasil karena di satu sisi lokasi tersebut tidak strategis untuk menjual dagangan mereka, sehingga sebagian dari mereka kembali kelokasi semula. Permasalahan tidak berhenti sampai di sini, ketika Pemerintah Daerah memaksa mereka untuk pindah ke area yang sudah ditetapkan bahkan hal tersebut terjadi berulang-ulang tetap saja pedagang yang ada di pasar pajak lama tetap membandel. Tidak hanya itu, Pemerintah daerah juga membangun tembok pembatas tempat berjualan pedagang kaki lima tetapi hasilnya tidak maksimal bahkan dengan tembok pembatas tersebut motor yang parkir di badan jalan semakin maju kedepan memakai badan jalan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Aswar selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir yang mengatakan :

“memang benar letak pasar pajak lama ini strategis, yaitu berada di tengah-tengah kota, bagi pedagang memang menguntungkan tapi tidak bagi kami. Disini kami telah berusaha untuk melakukan penertiban dan penataan pasar pajak lama ini. Kami bangun pasar pajak baru dan kami lengkapi segala fasilitasnya supaya

para pedagang mau memindahkan bahan dagangannya tapi upaya kami ini kurang berjalan. Kami juga membangun tembok pembatas supaya Pedagang Kaki Lima tidak melewati batas yang telah ditetapkan dan tidak memakai badan jalan, tapi hasil ini juga belum maksimal.

”(Wawancara 28 September 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar telah melakukan berbagai upaya dalam hal penataan pasar pajak lama ini, tetapi belum memiliki hasil yang maksimal.

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Tidak hanya menjadi persyaratan bagi pendirian lokasi pasar tradisional, persyaratan ini juga menjadi acuan dalam menentukan lokasi pendirian pusat perbelanjaan ataupun toko modern, baik yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Di Kabupaten Rokan Hilir, masalah zonasi pasar tradisional belum ada aturan yang jelas serta mengikat, dan karena di Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki Rencana

Tata Ruang Wilayah mengenai penataan dan pendirian pasar tradisional, tentunya ini juga berpengaruh terhadap pasar pajak lama. Pengaturan tata letak merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah daerah seharusnya mampu mengakomodir para pedagang yang ada dipasar pajak lama ini. Tapi kenyataan yang ada dilapangan masih terdapat para pedagang yang masih berjualan ditempat yang telah dilarang.

Berikut wawancara dengan Bapak Aswar selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa :

“ya mau bagaimana lagi, masalah zonasi pasar tradisional di Kabupaten Rokan Hilir ini belum ada aturan yang jelas dek. Kita berusaha untuk merampungkan RTRW Kabupaten dan kemudian baru kita buat peraturan zonasi pasar di Kabupaten Rokan Hilir ini”.
(Wawancara 28 September 2018).

2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Pelaku usaha yang mendirikan pasar tradisional harus melengkapi

dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi struktur penduduk mata pencarian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir, rencana kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana UMKM, ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, Dampak positif dan negative atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya, Tanggungjawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan pasar tradisional.

- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.

Dalam penyediaan area parkir di pasar pajak lama masih belum dapat menampung seluruh kebutuhan para pengunjung. Dengan masih kurangnya lahan parkir yang ada saat ini kemudian didukung dengan penataan kendaraan yang tidak sempurna didalam area parkir. Kemudian masih ditemukan pengunjung pasar yang parkir di badan jalan dan dari semua hal ini menimbulkan masalah yaitu kemacetan lalu lintas disekitar pasar.

Berikut wawancara dengan Bapak HM. Nasir selaku Camat Kecamatan Bagan Sinembah.

“Inilah yang menjadi permasalahan kita sekarang, lahan untuk parkir dipasar pajak lama ini tidak ada sehingga membuat para pembeli itu parkir dibadan jalan. tentunya ini sangat mengganggu ditambah lagi kalau ada bus besar yang lewat dari arah Medan sana” (Wawancara 20 Januari 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai parkir disekitaran pajak lama belum bisa diatasi dan hal ini sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain, sehingga sulit untuk akses keluar masuk oleh pengunjung pasar dan yang melintasi jalan disekitaran pasar pajak lama. Ditambah lagi pasar pajak lama ini berdiri dijalan lintas Riau – Sumatera Utara dan terletak ditengah kota Bagan Sinembah.

- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Fasilitas yang memadai menjadi menjadi factor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari serta menunjang aktivitas peningkatan fasilitas dilingkungan pasar. Menyediakan fasilitas di pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah lebih pada usaha untuk menambah sarana dan prasarana pasar dan merawat serta menjaga fasilitas yang dimiliki pasar agar bisa awet dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh pasar sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan yang ada dipasar. Hal ini karena

fasilitas pasar menunjang pelaksanaan tugas dan semua kegiatan yang akan dilakukan.

Kondisi fasilitas yang ada dipasar pajak lama masih kurang baik. Masih banyak kekurangan fasilitas yang ada dipasar ini, disekitar kios dan gang pasar masih terdapat banyak sampah yang berserakan akibat tidak adanya tempat penampungan sampah, tentu ini akan membuat setiap orang yang memasukinya menjadi tidak nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HM Nasir selaku Camat Kecamatan Bagan Sinembah mengatakan bahwa :

“Memang untuk fasilitas yang ada dipasar pajak lama ini memang banyak sekali kekurangannya, disebabkan karena anggaran kita tidak

ada. (Wawancara 20 Januari 2018).

“Memang banyak dek, pertama fasilitas parkirnya kita kurang karena lahan parkir disini terbatas, tempat sampah pun kita juga terbatas dek. ini syukur kemaren kami bisa membangun mushola untuk beribadah” (Wawancara dengan H. Sahwal pemilik pasar pajak lama 20 Januari 2018).

Kutipan wawancara diatas diketahui bahwa banyak fasilitas yang tidak ada di pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah. tentunya dengan tidak adanya fasilitas yang disediakan akan menjadi kendala untuk menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Tabel 1.4. Fasilitas Pasar Pajak Lama Tahun 2015 – 2017

No	Fasilitas Pasar Pajak Lama	Kondisi/ Keterangan
1	Kantor Pengelola	Tidak ada
2	Kantor Fasilitas Pembiayaan	Tidak ada
3	Ruang Serba Guna	Tidak ada
4	Toilet/Wc	Ada
5	Tempat Ibadah	Tidak ada
6	Pos Ukur Ulang	Tidak ada
7	Pos Kesehatan	Tidak ada
8	Pos Keamanan	Tidak ada
9	Tempat Penampungan Sampah Sementara	Tidak ada
10	Tempat Pengolahan Sampah	Tidak ada
11	Drainase	Tidak ada
12	Tempat Gudang Penyimpanan stok barang	Tidak ada
13	Area Bongkar Muat	Tidak ada
14	Tempat Parkir	Tidak ada
15	Alat pemadam kebakaran	Tidak ada
16	Sarana Air Bersih	Tidak ada
17	Instalasi Listrik	Ada

18	Telekomunikasi	Tidak ada
19	Papan Pengumuman informasi harga harian	Tidak ada
20	Akses jalan menuju pasar	Dapat dilalui kendaraan Roda 4
21	Sarana Transportasi Umum	Ada, kendaraan roda 2, 3 dan 4
22	Fasilitas CTV	Tidak ada

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar

Tabel 1.4 merupakan fasilitas pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak fasilitas yang tidak ada seperti kantor pengelola, kantor fasilitas perbelanjaan, ruang serba guna, tempat ibadah, pos ukur ulang, pos kesehatan, pos keamanan, tempat penampungan sampah/ tempat sampah, tempat pengolahan sampah, drainase, gudang tempat penyimpanan stok barang, area bongkar muat, tempat parkir, area penghijau, alat pemadam kebakaran, sarana air bersih, telekomunikasi, papan pengumuman informasi harga harian.

Dengan menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman tentunya dapat mendukung dan menguatkan peran pasar yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar. Disisi lain upaya untuk menghidupkan pasar tradisional dengan menyediakan fasilitas yang dapat menarik pengunjung pasar dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat perkotaan. Fasilitas penunjang tersebut dapat berupa toilet, papan informasi, ruang kesehatan, fasilitas taman, fasilitas istirahat berupa tempat duduk yang nyaman dititik-titik tertentu. Namun fasilitas seperti ini tidak ditemukan dipasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah.

Kendala- kendala dalam upaya penataan pasar pajak lama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.

1. Kurangnya Kesadaran Pedagang

Kesadaran pedagang dipasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses penataan pasar pajak lama ini. Namun kesadaran yang ditunjukkan oleh pedagang belum begitu besar. Hal tersebut terlihat dari adanya protes dan demonstrasi para pedagang yang berjualan dipasar pajak lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aswar selaku Kepala bidang pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar mengatakan bahwa :

“Kesadaran pedagang sangat dibutuhkan apalagi dalam hal penataan pasar pajak lama ini, kesadaran dari para pedagang belum begitu besar sehingga masih ada pedagang yang tidak menuruti dan mematuhi peraturan yang ada. Contohnya saja, kita kan sudah membangun pasar pajak baru yang fasilitasnya jauh lebih baik dari pasar pajak lama, tetapi pedagang ini tidak mau menempatkan pasar tersebut. Jikalau ada kesadaran dari pedagang tersebut untuk mematuhi

perintah kami, tentu mereka mau berjualan dipasar pajak baru.” (Wawancara 28 September 2018)

Sama halnya dengan yang diungkapkan bapak HM Nasir selaku Camat Kecamatan Bagan Sinembah mengatakan bahwa :

“Kalau peraturan yang sudah kita buat tidak diikuti oleh pedagang dan tidak adanya kesadaran untuk menerapkannya, percuma juga. Kemaren kami mensosialisaikan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum bahwasannya tidak boleh berjualan dibadan jalan, tapi mereka tidak menghiraukannya. Jadi harus ada keikutsertaan yang ditunjukkan pedagang agar penataan pasar pajak lama ini sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam kenyataannya kesadaran dari para pedagang masih rendah.”(Wawancara 20 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran para pedagang pasar pajak lama untuk mematuhi larangan supaya tidak berjualan dibadan jalan. Tidak adanya kesadaran dari pedagang yang ada dipasar pajak lama ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dari dinas perindustrian perdagangan dan

pasar khususnya bidang pasar dan instansi terkait dalam upaya penataan pasar pajak lama ini.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan factor penting dalam upaya penataan pasar pajak lama ini. Dalam upaya penataan pasar pajak lama ini masih terlihat sulit dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana pendukung. Hal ini terlihat masih banyaknya kekurangan yang berkaitan dengan dana operasional maupun mobil operasional.

Berikut wawancara dengan bapak HM Nasir selaku Camat bagan Sinembah.

“ kami selaku pihak Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah sudah berupaya dalam memperjuangkan anggaran dana ke Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tetapi sampai saat ini Pemerintah daerah kurang merespon. Tentunya kita tidak ingin pasar pajak lama ini memakan korban jiwa lagi akibat jalan yang rusak dan parkir yang sembrwut dan tentunya itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan”.(
Wawancara 20 Januari 2018)

“dana yang minim membuat kami sangat sulit untuk bergerak,

kadang kalau kami ingin bergerak kami pakai uang pribadi dulu, tentunya akan membutuhkan biaya minyak untuk transportasi dan biaya konsumsi untuk anggota. sedikitnya mobil operasional juga mengambat pelaksanaan kami dalam mengatasi permasalahan pasar pajak lama ini dan membuat kinerja kami kurang maksimal” (wawancara dengan bapak Suryadi SE selaku Kasat Pol PP Rokan Hilir).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting. Karna kalau tidak adanya sarana dan prasarana seperti dana operasional maupun mobil operasional maka kinerja dari instansi yang bertanggungjawab dalam penataan pasar pajak lama ini menjadi kurang maksimal dan itu menyebabkan sulitnya instansi tersebut melakukan penataan pasar.

Kesimpulan

1. Upaya penataan pasar pajak lama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 belum berjalan dengan maksimal. Pertama baik dari segi Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir masih belum rampung. Program kerja dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar tahun 2017 juga tidak ada pembahasan terkait penataan pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terlihat dari

masih semberawutnya dan belum tertatanya pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah. penyediaan areal parkir juga masih belum baik, karena masih kurangnya lahan parkir disekitaran pasar pajak lama dan ini sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dan masyarakat yang melintasi jalan disekitaran pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah.

2. Kendala dalam upaya penataan pasar pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir disebabkan karena kurangnya Kesadaran dari para pedagang untuk tidak berjualan disembarangan tempat. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional dan dana operasional menjadi kendala dalam penataan pasar pajak lama ini.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir seharusnya melengkapi sarana dan prasarana seperti mobil operasional dan dana operasional supaya kinerja dari masing-masing instansi bisa berjalan dengan baik. Seharusnya sarana dan prasarana yang ada dipasar pajak lama seperti tempat pembuangan sampah, tempat parkir dan drainase harus ada supaya para pedagang dan pembeli tidak membuang sampah dan parkir disembarangan tempat.
2. Pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar khususnya bidang pasar dibantu oleh Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas dalam bertindak

supaya ada efek jera dari pedagang kaki lima untuk tidak berjualan disembarangan tempat.

Daftar Pustaka

a. Buku

Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : CV Alfabeta.

Serang : Fisip Untirta Press

Bagong Suyanto & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :Prenada

Media Group.

Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta:

Bumi Aksara

Hakim, Muhammad Aziz. 2005. *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*. Jakarta

PT Krisna Persada

Haw. Widjaja. 2001. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada

Inu Kencana Syafiie, Dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT

Rineka Cipta.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar

Maju Cetakan I

Raharjo Adisasmata. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta :

Graha Ilmu. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan*

kepemimpinan).

Jakarta : Mutiara Sumber Widya.

Soejito, Irwan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Jakarta : PT. Rineka Cipta

Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press.

Zaidan Namaw. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Grafindo

Persada.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 2 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2016 tentang

kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja

Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar

c. Internet

[http://datariau.com/lingkungan/su
b/lingkungan/Parkir-di-
Badan-Jalan Pajak-Lama-
Bagan-Batu-Kota-
Ganggu-Lalulintas--
Pemerintah-Diminta-Cari-
Solusi](http://datariau.com/lingkungan/su
b/lingkungan/Parkir-di-
Badan-Jalan Pajak-Lama-
Bagan-Batu-Kota-
Ganggu-Lalulintas--
Pemerintah-Diminta-Cari-
Solusi). Diakses pada tanggal
25 November 2017

[http://gagasanriau.com/mobile/de
tailberita/25559/limbah-pasar
tradisional-pajak-lama-bagan-
batu-resahkan-masyarakat](http://gagasanriau.com/mobile/de
tailberita/25559/limbah-pasar
tradisional-pajak-lama-bagan-
batu-resahkan-masyarakat),
dikutip pada tanggal 02
Oktober 2017.

[https://news.detakriaunews.com/
berita-kondisi-pasar-pajak-
lama-bagan-batu-
sembrawut.html](https://news.detakriaunews.com/
berita-kondisi-pasar-pajak-
lama-bagan-batu-
sembrawut.html), dikutip pada
tanggal 30 September 2017.

[http://thesis.umy.ac.id/datapublik
/t19973.pdf](http://thesis.umy.ac.id/datapublik
/t19973.pdf), dikutip pada
tanggal 04 Oktober 2017.

d. Jurnal

Akmal, Koordinasi Antar Instansi
Terkait Dalam Pelaksanaan
Pembangunan

di Daerah, Demokrasi,
Volume V Nomor I, 2006.

Hamdan, H., Tahir, M.M (2016)

Peran Pemerintah Daerah dalam
Pelaksanaan Penataan
Pedagang Kaki Lima di Pasar
Minasamaupa
Kabupaten Gowa.
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6
(1)

Pebri Ana.S, Universitas
Riau, Koordinasi
Penataan Infrastruktur
Drainase di
Kota Pekanbaru,.

Pandji dalam Ratna Suminar.
2005. Koordinasi antar
instansi Pemerintah

Kota Bandar Lampung
dalam Pelaksanaan
Program Pengembangan
Kota Hijau. Bandar
Lampung : Universitas
Lampung.

Sat Warsiti, *Strategi
Pemberdayaan dalam Penataan
Pasar Legi oleh Dinas*

*Pengelolaan Pasar
Kota* diakses tanggal 06 Januari

2018. [https://eprints.uns.ac.id/610
9/1/209431611201104431.pdf](https://eprints.uns.ac.id/610
9/1/209431611201104431.pdf),